**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Penelitian**

Persoalan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) sekarang ini menjadi sorotan dan agenda para pengambil kebijakan baik dari pemerintah pusat ataupun daerah serta organisasi kemasyarakatan untuk melakukan upaya perbaikan sosial serta pemberdayaan sebagai salah satu keberlanjutan usaha ataupun program dalam penanggulangan kemiskinan.

Kebutuhan akan perumahan menjadi kebutuhan yang sangat mendasar dari masyarakat. Dalam hal ini pemenuhan prasyarat kesehatan dan keamanan dan kebutuhan hidup merupakan kebutuhan yang tidak semuanya dipenuhi oleh masyarakat. Oleh karenanya pemerintah melalui program PNPM mencoba untuk mengentaskan persoalan ini.

Berkaitan dengan persoalan ini, Nur Soleh, Direktur Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan, Kementerian Sosial ([www.lampungpost.com](http://www.lampungpost.com). 26/04/2013) menegaskan bahwa :

“Di Indonesia saat ini diperkirakan masih ada 2,3 juta keluarga miskin yang belum memiliki rumah layak huni. Kementerian Sosial bersama Kementerian Perumahan Rakyat, menargetkan penyediaan rumah layak huni bagi 215.000 keluarga miskin pertahun.”

Dalam menanggulangi permasalahan kemiskinan di Indonesia, pemerintah meluncurkan upaya/ kebijakan dengan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sejak tahun 1999 dengan tujuan agar terbangunnya kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan. Program tersebut telah memberikan manfaat bagi masyarakat sebagaimana yang disampaikan Agoes Widjanarko, Direktur Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum sebagai berikut :

“Sejak pelaksanaan P2KP-1 hingga pelaksanaan P2KP-3 saat itu telah terbentuk sekitar 6.405 BKM yang tersebar di 1.125 kecamatan di 235 kota/ kabupaten, telah memunculkan lebih dari 291.000 relawan-relawan dari masyarakat setempat, serta telah mencakup 18.9 juta orang pemanfaat (penduduk miskin) melalui 243.838 KSM.” Petunjuk Pelaksanaan PNPM Mandiri – P2KP (2007 : i).

Hal senada disampaikan kembali oleh Budi Yuwono P, Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum bahwa :

“Pada tahun 2008, keberlanjutan pelaksanaan P2KP diperluas lagi menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM Mandiri Perkotaan), dengan mengalokasikan tambahan dana yang cukup signifikan pada tahun anggaran 2008 yang mencakup 8.813 kelurahan di 995 kecamatan tersebar pada 245 kota/ kabupaten. Sejumlah 495.734 relawan dari masyarakat setempat melayani 3.509.192 KK penerima manfaat (Penduduk Miskin) yang tersebar di 101.280 KSM (*on progress*). “ Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan (2010 : i).

PNPM Mandiri adalah Program nasional dalam kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan adalah salah satu program pemberdayaan masyarakat yang mendukung PNPM Mandiri yang wilayah kerja dan target sasarannya adalah masyarakat pedesaan.

Dasar hukum pelaksanaan PNPM mengacu pada landasan konstitusional UUD 1945 beserta amandemennya, landasan idiil Pancasila dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Landasan khusus pelaksanaan PNPM Mandiri diatur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan No. 25/Kep/Menko/Kesra/VII/2007 Tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri.

Menurut Pedoman Pelaksanaan Mandiri Perkotaan (2010 : 8) bahwa tujuan umum PNPM yaitu

“Meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri “. Dengan demikian secara khusus tujuan PNPM MP dirumuskan sebagai berikut: “ Masyarakat di kelurahan/ pedesaan peserta program menikmati perbaikan sosial ekonomi dan tata pemerintahan lokal.”

Pelaksanaan Program PNPM bertumpu pada pendekatan proses partisipatif, keswadayaan dari kelompok masyarakat yang menjadi target program, sehingga pemerintah hanya sebagai fasilitator yang mengarahkan dan membimbing. Dalam implementasinya, program ini melibatkan seluruh unsur yang terdapat di daerah, mulai dari unsur pemerintah, pihak konsultan maupun segenap lapisan masyarakat yang menjadi sasaran program ini.

Tidak terpenuhinya perbaikan rutilahu (rumah tidak layak huni) salah satunya dikarenakan kurang sampainya informasi kepada masyarakat desa miskin tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Rutilahu ini. Disamping kurangnya aspiratif masyarakat, salah sasaran penerima bantuan pun tidak sedikit menjadi masalah, ditambah perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan lebih ditindaklanjuti dalam penanggulangan kemiskinan ketimbang rutilahu.

Adapun gambaran permasalahan pelaksanaan PNPM di Kecamatan Cileunyi diantaranya adalah lambatnya penerimaan bantuan dana terhadap rutilahu, mekanisme usulan perbaikan yang berbelit-belit. Disamping itu, jadwal pelaksanaan yang telah digambarkan pun tidak tepat waktu, sehingga perbaikan agak terganggu. Selain itu terbatasnya kemampuan serta keterampilan masyarakat dengan ditandai oleh rendahnya tingkat pendidikan dalam pelaksanaannya pun menjadi kendala pelaksanaan Rutilahu.

Berdasarkan pada uraian dan permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk mengambil judul dalam penelitian ini : “PEMENUHAN KEBUTUHAN PERUMAHAN MELALUI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT-MANDIRI (PNPM-M) DI KECAMATAN CILEUNYI KABUPATEN BANDUNG”.

1. **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi permasalahan pokok dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri (PNPM-M) di Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung ?
2. Bagaimana Pemenuhan Kebutuhan Perumahan di Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung ?
3. Bagaimana Pengaruh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri (PNPM-M) terhadap Pemenuhan Kebutuhan Perumahan di Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung ?
4. **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**
5. **Tujuan Penelitian :**

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan masalah-masalah penelitian yang akan dibahas. Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Program PNPM di Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Pemenuhan Kebutuhan Perumahan di Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.
3. Untuk Mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) terhadap Pemenuhan Kebutuhan Perumahan di Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.
4. **Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan teori-teori dan konsep-konsep kesejahteraan sosial yang berkaitan dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri (PNPM-M) di Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.

1. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan saran kepada pemerintah dan masyarakat terkait Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri (PNPM-M).

1. **Kerangka Pemikiran**

Sebagai landasan pokok pemikiran dalam penelitian ini, penulis mengajukan kerangka pemikiran yang dijadikan landasan teoritis dalam pembahasan permasalahan. Adapun kerangka pemikiran dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

Menurut James Midgley (1995) yang dikutip oleh Huraerah (2011:29) mendefinisikan pengertian Kesejahteraan Sosial adalah :

“Suatu keadaan manusia yang baik atau sejahtera yang wujudnya apabila masalah-masalah sosial terkendali (*social problems are managed*), apabila kebutuhan-kebutuhan manusia terpenuhi (*human needs are met*), dan apabila kesempatan-kesempatan sosial dimaksimalkan (*social opportunities are maximized*).”

Melihat kutipan diatas, adanya suatu tata kehidupan untuk memperbaiki kualitas hidup warga Negara yang meliputi didalamnya rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin dan menunjang kebutuhan-kebutuhan baik jasmani maupun rohani yang tidak terlepas dari hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan pancasila dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat itu sendiri.

Di dalam masyarakat, adanya aktivitas untuk membantu setiap warga Negara yang membutuhkan dengan berbagai permasalahan yang menimpa karena adanya ketidakmampuan masyarakat untuk menjalankan fungsi-fungsi sosialnya. Adapun pengertian pekerja sosial professional menurut UU RI No. 11 Tahun 2009 yang dikutip Suharto (2009:154) Mendefinisikan Pekerja Sosial Profesional adalah :

“Seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.“ (2009:154).

Program PNPM sebagai salah satu upaya untuk memberikan pelayanan pertolongan dan pemberdayaan guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya yang berada di Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.

Indonesia memiliki persoalan kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan di Indonesia dapat dilihat dari tiga pendekatan yaitu kemiskinan alamiah, kemiskinan structural, dan kesenjangan antar wilayah. Persoalan pengangguran lebih dipicu oleh rendahnya kesempatan peluang kerja bagi angkatan kerja di pedesaan. Upaya untuk menanggulanginya harus menggunakan pendekatan multi disiplin yang berdimensi pemberdayaan. Pemberdayaan yang tepat harus memadukan aspek-aspek penyadaran, peningkatan kapasitas, dan pendayagunaan.

Menurut Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia (2008:1) :“ PNPM Mandiri Pedesaan adalah “Program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan”. Melihat kutipan diatas, PNPM Mandiri Pedesaan adalah suatu program yang difokuskan dalam kemiskinan baik secara terpadu maupun berkelanjutan.

Pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu unsur yang penting dalam pembangunan sosial di masyarakat. Adapun pemberdayaan menurut Soharto (1977:215) yang dikutip oleh Huraerah (2011:96) adalah : “Suatu cara dengan mana rakyat mampu menguasai (berkuasa atas) kehidupannya “.

Melihat yang diungkapkan Aziz (2005:135) yang dikutip oleh Huraerah (2011:102) merinci tahapan-tahapan yang seharusnya dilalui dalam melakukan pemberdayaan adalah :”

1. Membantu masyarakat dalam menentukan masalah.
2. Melakukan analisis (kajian) terhadap permasalahan tersebut secara mandiri (partisipatif). Kegiatan ini biasanya dilakukan dengan curah- curah pendapat, membentuk kelompok-kelompok diskusi, dan mengadakan pertemuan warga secara periodik (terus menerus).
3. Menentukan skala prioritas masalah, dalam arti memilah dan memilih tiap masalah yang masih mendesak untuk diselesaikan.
4. Mencari penyelesaian masalah yang dihadapi, antara lain dengan pendekatan sosio-kultural yang ada dalam masyarakat.
5. Melaksanakan tindakan nyata untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.
6. Mengevaluasi seluruh rangkaian dan proses pemberdayaan itu untuk dinilai sejauhmana keberhasilan dan kegagalannya (2005 : 13).”

Dari konsep tersebut diatas, pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk mengatasi masalah yang dihadapi baik bersifat individu, kelompok, dan masyarakat agar mereka mampu melaksanakan peran sosialnya dengan wajar sebagaimana masyarakat yang lainnya.

Untuk memenuhi kebutuhan bagi kelangsungan hidup manusia, maka rumah merupakan wujud fisik yang dapat memberikan naungan bagi kebutuhan dasar manusia, tempat berlindung dari kondisi alam dan manusia lainnya. Pada awalnya memang rumah hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan fisiologis saja. Tetapi, dengan berkembangnya peradaban kebudayaan manusia, maka fungsi kebutuhan fisiologis, juga untuk memenuhi kebutuhan psikologis, misalnya kebutuhan akan estetika, status sosial ekonomi dan sebagainya.

Batasan tentang fungsi rumah menurut Lita Bane adalah sebagai berikut :

“Rumah adalah tempat kediaman seseorang dengan ikatan rasa kasih sayang, tempat dimana terdapat kasih sayang dari orangtua pada anak-anaknya dan antara seluruh anggota keluarga, dimana lahir keramahan pribadi, dimana yang belum dewasa terlindungi. Tempat dimana seseorang dapat beristirahat, mendapatkan pribadinya. Dimana dasar kebudayaan yang meliputi adat istiadat, bahasa kesopanan dan tradisi dikenalkan dan diwariskan pada anak-anak. Tempat dimana penghargaan diberikan, kepatuhan, kejujuran dan karakter-karakter terpuji lainnya ditanamkan, tempat perlindungan dan sumber inspirasi.“ (1952 : 172).

Peran rumah yang sangat penting dalam menunjang kebutuhan manusia, tercermin pula dalam pendapat Irving bahwa “perubahan lingkungan perumahan akan memberikan perbaikan pada tingkah laku, misalnya kesehatan, kebiasaan hidup dan kesejahteraan manusia “ ( 1989 : 189 ) . Asumsi ini banyak mendorong usaha-usaha baru dalam memperkenalkan perumahan rakyat dan program perbaikan daerah kumuh.

Snyder berpendapat tentang individu yang tinggal dilingkungan perumahan kumuh bahwa:

“Manusia/ individu yang tinggal di lingkungan perumahan yang buruk biasanya dapat merupakan sumber penyebaran penyakit, kemungkinan besar mendapatkan kecelakaan dirumahnya sendiri, serta mempunyai pandangan hidup yang pesimistis akan kemampuan.” ( 1979 : 281 ).

Demikian juga yang dikemukakan Dadi bahwa “ Perumahan akan berpengaruh pada pembinaan watak dan kepribadian serta merupakan faktor penting terhadap produktivitas dan kreativitas seseorang “ ( 1981 : 80 ).

Berdasarkan pemikirannya Harboenengin berpendapat bahwa :

“Rumah sebagai identitas sosial, karena pada umumnya seseorang mengadakan pemilihan rumah tidak hanya berdasarkan pertimbangan teknis aplikasi dan ekonomi saja, tetapi juga mempertimbangkan pengaruh terhadap status sosial serta hubungan sosial dengan tetangga-tetangganya, sehingga rumah mencerminkan identitas sosial penghuninya. Dari rumah akan muncul dinamika kehidupan yang mendorong lahirnya segala keputusan dan peraturan yang dikomunikasikan secara baik. Terciptanya komunikasi antara anggota keluarga mencerminkan rasa kebersamaan, kehangatan dan keintiman.”( 1987 : 87)

Dengan adanya berbagai fungsi dan peran dari rumah tersebut, maka sudah selayaknya bahwa setiap individu akan mendambakan rumah yang sehat dan layak. Agar dapat berhasil memenuhi fungsi dan perannya, maka suatu rumah tinggal memerlukan persyaratan-persyaratan tertentu. Nilai- nilai yang merupakan persyaratan agar dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia, serta bagi terciptanya suatu lingkungan pemukiman yang baik menurut Gold ( 1980 : 293) adalah dapat :”

1. Memenuhi persyaratan kesehatan dan keamanan, yaitu dapat terhindar dari ancaman bahaya lingkungan dan kriminalitas serta memperoleh kecukupan sinar matahari, udara dan air bersih.
2. Memenuhi persyaratan bagi kebutuhan hidup, yaitu cukup ruang bagi berbagai kegiatan dan terhindar dari kebisingan.
3. Memenuhi kebutuhan akan pencapaian, sehingga fasilitas pelayanan sosial dapat dicapai dengan mudah serta memberikan kemudahan untuk mendapatkan petunjuk yang jelas dalam mencapai tempat yang diinginkan.
4. Memenuhi kebutuhan akan identitas, dimana rumah berada di lingkungan yang dikenal dan penghuninya mempunyai rasa tanggung jawab untuk memelihara lingkungan walaupun rumah yang dihuni bukan miliknya, sehingga mendorong terciptanya hubungan sosial yang bersifat kekeluargaan.
5. Memenuhi kebutuhan simbolik, yang dapat diperoleh lingkungan yang teratur, menarik, dengan struktur sederhana, bersih dan terpelihara.
6. Memenuhi kebutuhan komunitas, dimana terdapat keadilan, keragaman cara hidup dan cita rasa, ekonomis dalam pemeliharaan serta membantu konservasi sumber daya alam.” (1980 : 293)

Menurut pedoman perencanaan lingkungan pemukiman kota, Dirjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum maka perumahan haruslah memenuhi beberapa persyaratan, yaitu :”

1. Tidak terganggu polusi (air, udara, suara)
2. Dapat disediakan air bersih (air minum)
3. Memberi kemungkinan untuk berkembang.
4. Mempunyai aksesibilitas yang baik.
5. Mudah dan aman mencapai tempat kerja.
6. Tidak dibawah permukaan air.
7. Dilengkapi dengan fasilitas lingkungan seperti sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana niaga dan industry (pusat perbelanjaan), taman, tempat bermain dan lapangan olahraga, dan jalan-jalan lingkungan.” (Direktorat Jenderal Cipta Karya : 1979 )

Manusia dalam menunjang kelangsungan hidupnya, akan selalu berupaya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya, baik yang bersifat fisik maupun yang bersifat non fisik/ psikologis. Berkaitan dengan kebutuhan akan papan atau rumah, maka pemenuhan kebutuhan perumahan secara fisik dalam hal ini berkaitan dengan keadaan fisik rumah seperti kelngkapan fasilitas yaitu listrik, air, sarana MCK/ sanitasi, luas rumah dan sebagainya. Sedangkan untuk pemenuhan kebutuhan perumahan secara psikologis dalam hal ini berkaitan dengan kebutuhan akan privacy dengan mengacu pada tata ruang dalam rumah, kebutuhan akan estetika, kebutuhan untuk dapat berhubungan dengan penghuni rumah lainnya dan sebagainya.

Maka yang dimaksud dengan pemenuhan kebutuhan perumahan dalam penelitian ini menurut Gold (1980 : 293) adalah “terpenuhinya nilai-nilai yang merupakan persyaratan agar memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia.

1. **Definisi Operasional**

Untuk mempermudah proses penelitian, maka penulis mengemukakan definisi operasional sebagai berikut :

1. PNPM Mandiri adalah Program Nasional dalam kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.
2. Pemenuhan kebutuhan perumahan dalam penelitian ini adalah kebutuhan dasar setiap individu sebagai suatu komoditas/ produk secara fisik maupun non fisik meliputi aspek fasilitas, lingkungan, sosial dan ekonomi dalam rangka mendukung segala aktivitas untuk kelangsungan hidup masyarakat Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.

**Tabel 1.1**

**Operasional Variabel Penelitian**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Variabel | Dimensi | Indikator | Item Pertanyaan |
| Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Melalui PNPM  (Gold, S. M. : 1980; Dinas PU : 2007) | 1. Memenuhi persyaratan kesehatan dan keamanan  2. Meme-nuhi per-syaratan bagi ke-butuhan hidup  3. Meme-nuhi kebu-tuhan akan pencapaian  4. Meme-nuhi ke-butuhan akan identitas rumah  5. Meme-nuhi kebutuhan simbolik  6. Meme-nuhi kebu-tuhan komunitas | 1. memperoleh kecukupan sinar matahari, udara dan air bersih.  2. terhindar dari ancaman bahaya lingkungan dankriminalitas  1. cukup ruang bagi berbagai kegiatan  2. terhindar dari kebisingan  1. fasilitas pelayanan sosial dapat dicapai dengan mudah  2. memberikan kemudahan untuk mendapatkan petunjuk yang jelas dalam mencapai tempat yang diinginkan  1. lantai tanah  2. dinding  3. Atap rumah  1. lingkungan yang teratur dan lebih baik 2. struktur sederhana, bersih dan terpelihara.  1. terdapat keadilan, keragaman cara hidup dan cita rasa  2. ekonomis dalam pemeliharaan | 1. Pembuatan ventilasi udara. 2. Kebutuhan Sinar Matahari. 3. Pembuatan sarana air bersih. 4. Kebutuhan Keamanan 5. Pembuatan Kamar Tidur 6. Pembuatan Dapur 7. Pembuatan Kamar Mandi 8. Dapat mengurangi Kebisingan 9. Kemudahan mencapai Mesjid 10. Kemudahan Mencapai Kantor RW 11. Mencapain Posyandu 12. Kemudahan Mencapai Sekolah 13. Kemudahan Mencapai Kantor Desa 14. Pembuatan lantai keramik 15. Pembuatan dinding rumah 16. Pembuatan atap rumah 17. Dapat membuat lingkungan teratur. 18. Dapat membuat lingkungan rumah yang lebih baik 19. Dapat membuat lingkungan rumah yang bersih 20. Dapat membuat lingkungan rumah terpelihara 21. Pembayaran perbaikan 22. Keragaman cara pandang tentang rutilahu 23. Pemeliharaan rumah yang ekonomis |

1. **Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data**
2. **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yang bersifat deskriptif analisis yaitu metode yang mengkaji suatu gejala atau masalah-masalah yang saat ini sedang terjadi. Data tersebut dikumpulkan kemudian ditabulasikan, dijelaskan dan dianalisis serta di interpretasikan guna mengkaji hipotesis yang diajukan.

1. **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian antara lain sebagai berikut :

1. Studi Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang tidak langsung kepada subjek peneliti. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data melalui dokumen, arsip, Koran, artikel-artikel dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian.

1. Studi Lapangan

Teknik pengumpulan data mengenai kenyataan yang berlangsung dilapangan dengan teknik-teknik sebagai berikut :

1. Observasi Non Partisipasi

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan cara melakukan pengamatan langsung tetapi tidak ikut dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan subjek yang diteliti tersebut.

1. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung atau lisan yang dilakukan oleh peneliti kepada Masyarakat di Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.

1. Angket

Yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan secara tertulis untuk diisi sendiri oleh responden dan diajukan langsung kepada responden, yaitu Masyarakat Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.

**3. Populasi dan Teknik Penarikan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Keluarga Sangat Miskin di Kecamatan Cileunyi yang mendapatkan bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri (PNPM-M) yaitu sebanyak 139 Kepala Keluarga. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah random Sampling yaitu teknik pengambilan sampel secara acak. Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel (sampling) menggunakan teknik random sampling yaitu pengambilan sampel secara acak. Sampel yang diambil adalah sebesar 25% dari populasi yaitu 34 KKM..

1. **Alat Ukur Penelitian**

Alat ukur penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah daftar pertanyaan yang disusun berdasarkan pedoman pada angket dengan menggunakan skala ordinal dengan jenis alat ukur yaitu skala model likert.

Menurut Suhartono (2008:76) menjelaskan pengertian skala :

“Skala pengukuran yang objek penelitiannya dikelompokkan berdasarkan ciri-ciri yang sama ataupun ciri-ciri yang berbeda. Golongan-golongan atau klasifikasi dalam skala ordinal dapat dibedakan tingkatannya. Ini berarti suatu golongan diketahui lebih tinggi atau lebih rendah tingkatannya, dari pada golongan lainnya”.

Sedangkan teknik pengukuran yang digunakan adalah model likert, dengan cara membuat kategori pada setiap item pertanyaan yang diberi nilai sebagai berikut :

a. Kategori jawaban sangat baik diberi nilai 5.

b. Kategori jawaban baik diberi nilai 4.

c. Kategori jawaban cukup diberi nilai 3.

d. Kategori jawaban kurang baik diberi nilai 2.

e. Kategori jawaban sangat tidak baik diberi nilai 1.

**5. Teknik Analisis Data**

Untuk menguji pertanyaan penelitian, penulis menggunakan data kuantitatif. Untuk data kuantitatif digunakan uji statistik mean, median simpang kuartil dengan menggunakan skala ordinal.

**Rumus median**

Me = Q2 = xn+1/2, jika n ganjil

Xn/2+xn/2+1/2, jika n genap

**Rumus simpang kuartil**

SK = ½ (K3-K1)

SK = Simpangan Kuartil

K3 = Kuartil ketiga

K1 = Kuartil pertama

(Metode Statistika, 1996)

**G. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian**

**1. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. Peneliti memilih lokasi (PNPM) mandiri pedesaan sebagai wadah melakukan proses penelitian karena :

1. Karena Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung merupakan kecamatan penerima bantuan (PNPM) .

2. Pemenuhan Perumahan di Kecamatan Cileunyi masih kurang.

**2. Waktu Penelitian**

Waktu yang direncanakan penulis adalah selama enam bulan terhitung sejak pertengahan bulan Januari 2014 sampai akhir Juni 2014, dengan selang waktu kegiatan yang dijadwalkan sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan

2. Tahap Pelaksanaan

3. Tahap Pelaporan